

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN
KEUANGAN MASJID DI WONOSOBO
(SSTUDI EMPIRIS PASA MASJID YANG TERDAFTAR
DI KEMENAG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019)**

Susi Haryanti, M. Elfan Kaubab

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)

Email : susiharyanti432@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masjid di Kabupaten Wonosobo. Peneliti ini juga bertujuan menganalisis bagaimana pengelolaan laporan keuangan Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data dari 37 masjid yang sudah melakukan pembukuan laporan keuangan dan tercatat di Kementerian Agama (KEMENAG) di Kabupaten Wonosobo.

Konsep ini secara spesifik menjelaskan bagaimana proses laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas masjid yang ada di Kabupaten Wonosobo, sehingga dapat di jadikan informasi bagi masyarakat terkait tingkat transparansi dan akuntabel di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini hanya terbatas pada 37 masjid yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian agar tidak hanya 37 masjid yang ada di Kabupatrn Wonosobo, melainkan menambah jumlah masjid yang ada serta menambah objek lain seperti Temanggung atau Banjarnegara untuk membandingkan tingkat transparansi dan akuntabel yang ada.

Kata Kunci : Transpaansi, akuntabilitas dan laporan keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how transparency and accountability of mosque financial reports in Wonosobo Regency. This researcher also aims to analyze how the management of Wonosobo Regency financial statements. This study uses a descriptive qualitative approach, using data from 37 mosques that have recorded financial statements and are recorded at the Ministry of Religion (KEMENAG) in Wonosobo Regency.

This concept specifically explains how the financial reporting, transparency and accountability of mosques in Wonosobo Regency can be made information for the public regarding the level of transparency and accountability in Wonosobo District.

This research is only limited to 37 mosques in Wonosobo Regency. So it is recommended to further researchers to expand the object of research so that not only 37 mosques in Wonosobo Regency, but increase the number of existing mosques and add other objects such as Temanggung or Banjarnegara to compare the level of transparency and accountability.

Keywords : *Transparency, accountability and financial statements*

1. PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dananya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa mengharapkan laba, dan tidak memiliki kepemilikan (Aryaruddin Muhammad dkk, 2017). Sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelolaan dananya bahkan tidak mengetahui bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang ada (Pratama dkk, 2017). Oleh karena itu pengelola masjid (takmir) perlu menerapkan sistem laporan keuangan masjid.

Laporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan (Mandasari, 2015).

Dengan kata lain, laporan keuangan atau bentuk laporan lainnya yang berhubungan dengan posisi keuangan perlu menjadi perhatian serius dan perlu dilaporkan ke publik agar tidak meresahkan dan menimbulkan kecurigaan antara pengurus dan jamaah.

Dengan demikian, fungsi akuntansi menjadi sangat penting karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang di hasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan masjid.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah kurang pemahamnya pengurus masjid yang ada di Wonosobo dalam penyajian laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana laporan keuangan masjid yang ada di Kabupaten Wonosobo?
- Bagaimana penerapan transparansi pengelolaan keuangan di masjid Wonosobo?

- Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan di masjid Wonosobo?

2. LANDASAN TEORI

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Baridwan Zaki, 2008). Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu [periode akuntansi](#) yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Gitman, 2012).

Transparansi

Transparansi keuangan kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2010). Sedangkan Menurut Dwiyanto (2005) akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholder*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Satori (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif

dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari lapangan penelitian. Peneliti ini menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Burhan Bungin, 2012).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang dengan demikian data adalah kalimat yang merupakan pendapat dari Informan berupa hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

- Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
- Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode interpretif. Diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penelitian sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.
- Penarikan Kesimpulan, dari pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Karena peneliti juga termasuk sebagai bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data telah dicek keakuratannya dan validitasnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini dilakukan melalui wawancara pada kurun waktu bulan Maret-Juni 2019. Dimana seluruh informasi di dapatkan dari wawancara pengurus masjid yang ada di Wonosobo. Penelitian ini mengambil sampel 37 masjid yang sudah melakukan sistem pembukuan laporan keuangan secara sederhana dan terdaftar di Kementerian Agama (KEMENAG). Berikut adalah daftar masjid dalam penelitian ini :

Tabel 1. Daftar sampel

No	Nama Masjid	No	Nama Masjid
1	Jawahirul Akbar (Kalianget)	20	Baitussalam (Tambih)
2	Al-Badar (Sumberan)	21	Al-firdaus (Watumalang)
3	Al-Mansur (Kauman)	22	Hidayatulloh (Garung)
4	At-jami' (Wonosobo)	23	Nurul Huda (Leksono)
5	Darussalam (Tawang Sari)	24	Al-Muttaqin (Selomerto)
6	Roudlotul Muttaqin (Krasak)	25	Al-Amin (Sukoharjo)
7	Al-Ma'un (Mojotengah)	26	Al-Falah (Leksono)
8	Al-Muhrom (Sambek)	27	Al-Huda (Sudagaran)
9	Baitul Rahim (kalibeber)	28	Attaqwa (Kepil)
10	Al-Ikhlas (Kejiwan)	29	Al-Amin (Sukoharjo)
11	Baitu Makmur (Slukatan)	30	Baiturrohim (Sapuran)
12	Baitur Rohman (Sukoharjo)	31	Nurul Huda (Kalibawang)
13	Al-Mannah (Kebrengan)	32	Nurul Huda (Mendolo)
14	Asy-suzaiyah (munggang)	33	Baitul Amin (Bomerto)
15	Istiqomah (Bumireso)	34	Baitussholikhin (Kebumen)
16	Darul Arqom (Watumalang)	35	Al-kafi (Kalilawang)
17	Manba'ul Anwar (Krasak)	36	Al-Fatah (Tracap)
18	Attaqwa (Garung)	37	Al-mas'ud (Kaliwiro)
19	Al-Muhajirin (Kemiri)	-	

Bentuk Laporan Keuangan Masjid

Bentuk laporan keuangan yang dilakukan pengurus masjid dalam mengatur keuangan organisasi sangat berbeda antara masjid satu dengan yang lainnya. Ada yang di laporkan secara rutin setiap satu bulan sekali dan ada pula yang pelaporannya hanya dilakukan ketika ada pemasukan ataupun pengeluaran masjid. Berikut daftar laporan keuangan dari 37 masjid yang sesuai dengan kriteria:

Tabel 2. Daftar Lapoan Keuangan Masjid Wonosobo

No	Nama Masjid	Indikator Laporan Keuangan			
		Relevan	Andal	Dapat di Bandingkan	Dapat di Pahami
1	Jawahirul Akbar (Kalianget)	✓	✓	✓	✓
2	Al-Badar (Sumberan)	✓	✓	✓	✓
3	Al-Mansur (Kauman)	✓	✓	✓	✓
4	Jami' (Wonosobo)	✓	✓	✓	✓
5	Darussalam (Tawangsarri)	✓	✓	✓	✓
6	Roudlotul Muttaqin (Krasak)	✓	✓	✓	✓
7	Al-Ma'un (Mojo tengah)	✓	✓	✓	✓
8	Al-Muhrom (Sambek)	✓	✓	✓	✓
9	Baitul Rahim (kalibeber)	✓	✓	✓	✓
10	Al-Ikhlash (Kejiwan)	✓	✓	✓	✓
11	Baitu Makmur (Slukatan)	✓	✓	✓	✓
12	Baitur Rahman (Sukoharjo)	✓	✓	✓	✓
13	Al-Mannah (Kebrengan)	✓	✓	✓	✓
14	Asy-suzaiyah (munggang)	✓	✓	✓	✓

No	Nama Masjid	Indikator Laporan Keuangan			
		Relevan	Andal	Dapat di Bandingkan	Dapat di Pahami
15	Istiqomah (Bumireso)	✓	✓	✓	✓
16	Ash-Siddiq (Garung)	✓	✓	✓	✓
17	Manba'ul Anwar (Krasak)	✓	✓	✓	✓
18	Attaqwa (Garung)	✓	✓	✓	✓
19	Al-Muhajirin (Kemiri)	✓	✓	✓	✓
20	Baitussalam (Tambi)	✓	✓	✓	✓
21	Al-firdaus (Watumalang)	✓	✓	✓	✓
22	Darul Falah (Bojasari)	✓	✓	✓	✓
23	Nurul Huda (Leksono)	✓	✓	✓	✓
24	Al-Muttaqin (Selomerto)	✓	✓	✓	✓
25	Al-Amin (Sukoreno)	✓	✓	✓	✓
26	An-Nur Kabelukan	✓	✓	✓	✓
27	Al-Huda (Sudagaran)	-	✓	-	✓
28	Attaqwa (Kepil)	-	✓	-	✓
29	Al-Amin (Sukoharjo)	-	✓	-	✓
30	Baiturrohim (Sapuran)	-	✓	-	✓
31	Al-Jihad (Watumalang)	-	-	-	✓
32	Nurul Huda (Mendolo)	-	-	-	✓
33	Baitul Amin (Bomerto)	-	✓	✓	-
34	Baitussholikhin (Kebumen)	-	✓	✓	-
35	Al-kafi (Kalilawang)	-	✓	✓	-

No	Nama Masjid	Indikator Laporan Keuangan			
		Relevan	Andal	Dapat di Bandingkan	Dapat di Pahami
36	Al-Fatah (Tracap)	-	✓	✓	-
37	Al-mas'ud (Kaliwiro)	-	✓	✓	-

Dari tabel di atas masjid-masjid yang sudah memiliki laporan keuangan sesuai dengan kriterianya sebanyak 26 masjid. Sebelas (11) masjid sisanya tidak sesuai dengan kriteria yang ada dan memiliki permasalahan yang berbeda. Permasalahan *pertama* laporan keuangan dari 6 masjid menunjukkan tidak relevan dan tidak bisa di bandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya karena tidak adanya pembukuan secara rutin, tetapi masih mudah untuk dipahami karena masih ada laporan keuangan yang di laporkan kepada masyarakat dengan menggunakan papan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan masjid pada saat itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet bendahara Masjid Al-Amin Sukoharjo sebagai berikut:

"masjid ini memang tidak melakukan pembukuan keuangan secara rutin karena semua pengurus masjid sudah sepuh tetapi masih tetap menulis laporan keuangan di papan informasi walaupun sesederhana mungkin."

Kedua ada 5 masjid yang laporan keuangannya tidak bisa di bandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan masih sangat sulit dipahami. Sedangkan 26 masjid sudah sesuai dengan kriteria atau indikator yang ada yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami, hanya saja berbeda dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya. Salah satunya Masjid Jawahirul Akbar yang memisahkan antara pencatatan harian dan pencatatan khusus pembangunan masjid.

Tetapi dari 37 masjid yang ada di Wonosobo tidak ada yang menyajikan atau yang melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yaitu PSAK No. 45 karena jarang sekali pengurus masjid atau bendahara masjid yang paham dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang benar, walaupun ada pengurus masjid yang paham terkait hal itu maka proses dalam pembuatan laporan keuangan tetap saja

menggunakan sistem yang sangat sederhana karena masyarakat setempat kurang paham tentang standar akuntansi bahkan banyak sekali masyarakat yang terdengar asing ketika mendengar proses pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Sistem Transparansi Laporan Keuangan Masjid

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan oleh pengurus kepada jamaah. Karena jamaah sekaligus donator mempunyai hak untuk mengetahui arus kas masjid, sementara pengurus masjid mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas masjid.

Bentuk transparansi keuangan Masjid di Kabupaten Wonosobo masih sangat sederhana. Dari 37 masjid yang diteliti di Kabupaten Wonosobo yang sudah melakukan transparansi laporan keuangan sebanyak 26 masjid. Sedangkan lainnya belum melakukan transparansi laporan keuangan. Berikut daftar masjid yang melakukan transparansi dan yang belum melakukan transparansi laporan keuangan sesuai dengan indikator:

Tabel 3. Daftar Transparansi Masjid

No	Nama Masjid	Indikator Transparansi		
		Informatif	Keterbukaan	Pengungkapan
1	Jawahirul Akbar (Kalianget)	✓	✓	✓
2	Al-Badar (Sumberan)	✓	✓	✓
3	Al-Mansur (Kauman)	✓	✓	✓
4	Jami' (Wonosobo)	✓	✓	✓
5	Darussalam (Tawang Sari)	✓	✓	✓
6	Roudlotul Muttaqin (Krasak)	✓	✓	✓
7	Al-Ma'un (Mojo Tengah)	✓	✓	✓
8	Al-Muhrom (Sambek)	✓	✓	✓
9	Baitul Rahim (kalibeber)	✓	✓	✓
10	Al-Ikhlas (Kejiwan)	✓	✓	✓
11	Baitu Makmur (Slukatan)	✓	✓	✓
12	Baitur Rahman (Sukoharjo)	✓	✓	✓
13	Al-Mannah (Kebrengan)	✓	✓	✓
14	Asy-suzaiyah (munggang)	✓	✓	✓
15	Istiqomah	✓	✓	✓

No	Nama Masjid	Indikator Transparansi		
		Informatif	Keterbukaan	Pengungkapan
	(Bumireso)			
16	Ash-Siddiq (Garung)	✓	✓	✓
17	Manba'ul Anwar (Krasak)	✓	✓	✓
18	Attaqwa (Garung)	✓	✓	✓
19	Al-Muhajirin (Kemiri)	✓	✓	✓
20	Baitussalam (Tambi)	✓	✓	✓
21	Al-firdaus (Watumalang)	✓	✓	✓
22	Darul Falah (Bojasari)	✓	✓	✓
23	Nurul Huda (Leksono)	✓	✓	✓
24	Al-Muttaqin (Selomerto)	✓	✓	✓
25	Al-Amin (Sukoreno)	✓	✓	✓
26	An-Nur Kabelukan	✓	✓	✓
27	Al-Huda (Sudagaran)	✓	✓	✓
28	Attaqwa (Kepil)	-	✓	✓
29	Al-Amin (Sukoharjo)	-	✓	✓
30	Baiturrohim (Sapuran)	-	✓	✓
31	Al-Jihad (Watumalang)	-	✓	✓
32	Nurul Huda (Mendolo)	-	✓	✓
33	Baitul Amin (Bomerto)	✓	✓	-
34	Baitussholikhin (Kebumen)	✓	✓	-
35	Al-kafi (Kalilawang)	✓	✓	-
36	Al-Fatah (Tracap)	✓	✓	-
37	Al-mas'ud (Kaliwiro)	✓	✓	-

Dari tabel diatas masjid-masjid yang tidak melakukan transparansi laporan keuangan sebanyak 11 masjid, hal ini dikarenakan masjid-masjid tersebut apabila ditinjau dari model kriteria transparansi tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Permasalahan dari 11 masjid tersebut, yaitu *pertama* dalam menyajikan laporan keuangannya tidak bisa memberikan arus informasi berupa penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Masalah *kedua* yaitu tidak memberikan informasi laporan keuangan

kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial, permasalahan ini ada karena dalam penyusunan kepengurusan masjid masih menunjukkan ketidakjelasan pembagian kerja.

Sedangkan masjid yang lain seperti Masjid Al-Huda Sudagaran, Masjid Attaqwa Kepil, Masjid Al-Amin Sukoharjo, Masjid Baiturrohim Sapuran, Masjid Al-Falah Leksono dan Masjid Nurul Huda Mendolo sudah memiliki kepengurusan masjid yang jelas, hanya saja pengurus masjid memang kurang paham dalam melakukan pembukuan laporan keuangan dan kurang telaten dalam membuat laporan keuangan karena peran pemuda sangatlah kurang dalam kepengurusan masjid sehingga banyak sekali keuangan masjid yang tidak tercatat dan tidak terbukukan.

Kemudian masjid yang sudah melakukan transparansi laporan keuangan sebanyak 26 masjid yang sesuai dengan kriteria atau indikator, yaitu informatif, keterbukaan dan pengungkapannya jelas, walaupun dengan cara yang sangat sederhana dan berbeda-beda. Dari 26 masjid diatas bisa memberikan jaminan kemudahan kepada pihak luar yang mempertanyakan mengenai informasi hasil keuangan masjid. Bentuk transparansi yang diterapkan oleh 26 masjid tersebut dibagi menjadi 2 cara, yang *petama* yaitu dengan cara mengumumkan keuangan masjid melalui pengeras suara yang dilakukan mingguan atau bulanan, seperti Masjid Al-Mansur.

Bentuk transparansi yang *kedua* dengan cara menulis keuangan masjid di papan informasi, yaitu seperti Masjid Ash-Siddiq Garung, Masjid Al-Ikhlas Kejiwan yang selalu menuliskan keuangan yang masuk dipapan informasi dalam setiap minggunya setelah selesai sholat jumat. Karena menurut pengurus masjid cara seperti ini lebih efektif dari pada hanya di siarkan melalui pengeras suara saja.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid

Akuntabilitas merupakan hal terpenting dari pembuatan laporan keuangan, karena inti dari pembuatan laporan keuangan adalah menunjukkan hasilnya kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai suatu sikap yang harus dilaksanakan dan diterapkan. Berikut data akuntabilitas dari 37 masjid yang ada di Wonosobo.

**Tabel 4. Daftar Akuntabilitas Masjid
Wonosobo**

No	Nama Masjid	Indikator Akuntabilitas					No	Nama Masjid	Indikator Akuntabilitas					
		Hukum dan Kejujuran	Manajeril	Program	Kebijakan	Finansial			Hukum dan Kejujuran	Manajeril	Program	Kebijakan	Finansial	
							(Garung)							
							17	Manba'ul Anwar (Krasak)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	Jawahirul Akbar (Kaliangent)	✓	✓	✓	✓	✓	18	Attaqwa (Garung)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Al-Badar (Sumberan)	✓	✓	✓	✓	✓	19	Al-Muhajirin (Kemiri)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Al-Mansur (Kauman)	✓	✓	✓	✓	✓	20	Baitussalam (Tambi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Jami' (Wonosobo)	✓	✓	✓	✓	✓	21	Al-firdaus (Watumalang)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Darussalam (Tawangari)	✓	✓	✓	✓	✓	22	Darul Falah (Bojasari)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Roudlotul Muttaqin (Krasak)	✓	✓	✓	✓	✓	23	Nurul Huda (Leksono)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Al-Ma'un (Mojotengah)	✓	✓	✓	✓	✓	24	Al-Muttaqin (Selomerto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Al-Muhrom (Sambek)	✓	✓	✓	✓	✓	25	Al-Amin (Sukoreno)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Baitul Rahim (kalibeber)	✓	✓	✓	✓	✓	26	An-Nur Kabelukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Al-Ikhlash (Kejiwan)	✓	✓	✓	✓	✓	27	Al-Huda (Sudagaran)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Baitu Makmur (Slukatan)	✓	✓	✓	✓	✓	28	Attaqwa (Kepil)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Baitur Rahman (Sukoharjo)	✓	✓	✓	✓	✓	29	Al-Amin (Sukoharjo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Al-Mannah (Kebrengan)	✓	✓	✓	✓	✓	30	Baiturrohim (Sapuran)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Asy-suzaiyah (mungganng)	✓	✓	✓	✓	✓	31	Al-Jihad (Watumalang)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Istiqomah (Bumireso)	✓	✓	✓	✓	✓	32	Nurul Huda (Mendolo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Ash-Siddiq	✓	✓	✓	✓	✓	33	Baitul Amin (Bomerto)	✓	-	✓	✓	-	-
							34	Baitussholikhin	✓	-	✓	✓	-	-

No	Nama Masjid	Indikator Akuntabilitas				
		Hukum dan Kejujuran	Manajerial	Program	Kebijakan	Finansial
	(Kebumen)					
35	Al-kafi (Kalilawang)	✓	-	✓	✓	-
36	Al-Fatah (Tracap)	✓	-	✓	✓	-
37	Al-mas'ud (Kaliwiro)	✓	-	✓	✓	-

Dari tabel diatas masjid-masjid yang tidak melakukan akuntabilitas laporan keuangan sebanyak 11 masjid, hal ini dikarenakan masjid-masjid tersebut apabila ditinjau dari model kriteria akuntabilitas tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Permasalahan dari 11 masjid tersebut berbeda yaitu yang *pertama* dari 11 masjid tidak memiliki laporan keuangan yang rutin, yang *kedua* dari 11 masjid ada 5 masjid yaitu Masjid Al-Mas'ut, Masjid Al-Fatah Teracap, Masjid Al-Kafi Kalilawang, Masjid baitul Amin Bomerto, Masjid Baitussholikhin Kebumen yang pertanggung jawaban semua aktifitas masjid di limpahkan kepada ketua dan badan pengurus harian saja, sedangkan pengurus yang lainnya kurang memperhatikan bagian kerjanya masing-masing.

Sedangkan 26 masjid sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Semua masjid menerapkan sistem kejujuran antara pengurus satu dengan pengurus yang lainnya dan mengutamakan musyawarah apabila terjadi masalah atau mengambil keputusan. Karena semua pengurus masjid sudah memiliki kesadaran atas pentingnya profesionalitas dalam sebuah pekerjaannya. Sehingga dalam melakukan tugasnya sudah sesuai dengan bagiannya masing-masing.

5. PENUTUPAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Jadi dari 37 masjid yang ada di Kabupaten Wonosobo 70% sudah melakukan proses pencatatan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan kriteria atau indikator yang ada. Walaupun ada yang secara rutin melakukan proses pencatatan laporan keuangan dan ada yang tidak rutin.
- Dari 37 masjid ada 70% yang sudah melakukan praktek transparansi kepada masyarakat setempat dan proses transparansi ini kebanyakan menggunakan media tulis dengan cara memanfaatkan papan informasi yang ada, karena menurut beberapa pengurus masjid salah satu cara ini yang paling efektif untuk diterapkan dengan menulis laporan keuangan di papan informasi agar bisa di akses kapan saja dan dengan siapa aja baik pihak masyarakat setempat sampai para donatur-donatur yang menyumbangkan uangnya.
- Laporan keuangan dari 37 masjid yang ada di Wonosobo 70% yang melakukan akuntabilitas sesuai dengan kriteria. Melihat data tersebut berarti tingkat akuntabilitas masjid yang ada di Wonosobo cukup tinggi. Walaupun tingkat pemahaman dan sumber daya manusianya sangat minim dalam pembuatan laporan keuangan tetapi karena kepercayaan dan kejujuran yang dibangun maka menghasilkan akuntabilitas yang bagus.

Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat direkomendasikan kepada pengurus masjid yang ada di wonosobo adalah agar lebih memperhatikan dalam pembukuan laporan keuangan masjid untuk lebih transparan dan akuntabel secara teliti, selain itu pengurus masjid terutama bendahara juga harus mampu memisahkan laporan keuangannya sesuai dengan jenisnya karena hal ini akan mempermudah dipahami para donator dan masyarakat setempat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2011. "Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Publik", Yogyakarta: BPFU UGM.

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Afiyanti, Yati. 2008. *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12 No. 2 Juli 2008: hal 137-141.
- Ahyaruddin Muhammad dkk, 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru*. Jurnal Pengabdian untuk Mu Negeri, Vol.1, NO. 1, Mei 2017.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Alqodri, Muhammad. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. JOM. FEKON Vol. 2 No. 2.
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Edisi 3. Penerbit: Erlangga.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Dahnil Anzar Simanjuntak. 2011. *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid*. SNA No.7
- Dadang Solihin. (2007). *Penerapan Good Governance di sector public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Public*. (Online). Tersedia: [\(18 Mei 2011\)](http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good-governancedi-sektor-publik-untuk-meningkatkan-kinerja-lembaga-publik).
- Deddy dan Sherly.(2010), *Peranan Audit Kinerja Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Bandung*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 1.
- Deddi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat) Departemen Agama RI Edisi Tahun 2002.
- Didjaja Mustopa, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Dwiyanto,A. (2005 : 147). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Edy, Suprianto. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Elvira Zeyn, Nur. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Governance Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas keuangan*. Jurnal Akuntan Vol. 10 No. 1.
- Ending. 2017. *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Serayu*, jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Vol VI, No 1
- Gitman, Lawrence. 2012. *Principle of Managerial Finance*. Eleventh Edition. New Jersey: Pearson Education.Inc.
- Hadi, Sutrisno. 2009. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. dan M, Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit: Salemba 4.
- Hermawan Sigit, Amirullah. 2016. *Metodelogi Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Media Nusa Creative, Malang.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kristianto, Yudi. 2011. *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Komputer Indonesia, Bandung

- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000)
- Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), *Membumikan Transparan Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun et al, 2013. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-4*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No. 1. Hal. 1- 17.